

JAES Jendela Aswaja e-ISSN <u>2745-9470</u>





Efektivitas Sistem Informasi Elektronik Surat Perintah Perjalanan Dinas (E-Sppd) Dalam Meningkatkan Administrasi Perjalanan Dinas Pegawai Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh

Muhammad Febria Azmi¹, Triyuni Soemartono, Harry Nenobais³

Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia

e-mail/korespondensi: muhammadfebriaazmi@gmail.com Submit: 1 Mei 2025, Diterima: 1 Juni 2025, Terbit: 30 Juni 2025

Abstrak

Tujuan penelitian. Pemerintah Kota Payakumbuh melaksanakan banyak perjalanan dinas bagi pegawai untuk menjalankan tugasnya. Sebelumnya, administrasi perjalanan dinas dilakukan secara manual, tetapi sejak Agustus 2018, Pemerintah Kota Payakumbuh menggunakan Aplikasi e-SPPD. Aplikasi ini memudahkan pengajuan izin dan evaluasi perjalanan dinas bagi ASN secara online. Dengan e-SPPD, proses persetujuan dan pengarsipan dokumen menjadi lebih cepat dan aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil evaluasi dari implementasi penggunaan e-SPPD pada Pemerintahan Daerah di Kota Payakumbuh.

Bahan dan Metode. Penelitian ini menggunakan model penilaian efektivitas DeLone dan McLean (2016) yang terdiri dari enam dimensi yang terdiri dari kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas pelayanan, maksud penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang terkait yakni Pj Wali Kota Payakumbuh, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretaris Dinas Kominfo, Sub Koordinator Keuangan, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, dan Inspektur Kota Payakumbuh.

Hasil. Hasil penelitian ini yaitu efektivitas sistem informasi e-SPPD dalam administrasi perjalanan dinas ASN di Kota Payakumbuh dinilai melalui enam dimensi. Kualitas sistem dianggap baik dengan antarmuka simple dan akses yang mudah, meskipun tidak mendukung perangkat iOS. Sistem ini mengurangi kesalahan dan memungkinkan pelacakan status pengajuan Surat Tugas. Keamanan juga baik dengan otentikasi dua faktor dan monitoring rutin.

Kesimpulan. Hasil evaluasi menunjukkan efisiensi dan transparansi, walau ada kekurangan dalam notifikasi otomatis dan perlunya tambahan data rekapitulasi yang selalu diperbaharui terkait jumlah anggaran perjalanan dinas setiap Organisasi Perangkat Daerah. Pengguna merasa puas, tetapi pegawai yang lebih tua mungkin butuh bantuan dan penyesuaian. Hambatan termasuk adaptasi teknologi dan kekhawatiran tentang keamanan data. Pemda berusaha menyediakan pelatihan dan melindungi data untuk mendukung sistem.

Kata Kunci: Evaluasi, kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas pelayanan, kepuasan pengguna, manfaat bersih.

Abstract

Research purpose. The Payakumbuh City Government conducts many official trips for employees to carry out their duties. Previously, official travel administration was done manually, but since August 2018, the Payakumbuh City Government has been using the e-SPPD application. This application facilitates online submission of permits and evaluation of official travel for civil servants. With e-SPPD, the document approval and filing process is faster and more secure. This study aims to analyse the results of the evaluation of the implementation of e-SPPD in the local government of Payakumbuh City.

Materials and Methods. This study uses the DeLone and McLean (2016) effectiveness assessment model, which consists of six dimensions: information quality, system quality, service quality, intended use, user satisfaction, and net benefits. This study was conducted by interviewing relevant sources, namely the Acting Mayor of Payakumbuh, the Head of the Leadership Administration Subdivision, the Secretary of the Communication and Information Agency, the Deputy Coordinator of Finance, the Regional Secretary of Payakumbuh City, and the Inspector of Payakumbuh City.

Results. The results of this study show that the effectiveness of the e-SPPD information system in the administration of civil servant business trips in Payakumbuh City was assessed through six dimensions. The system quality was considered good with a simple interface and easy access, although it does not support iOS devices. This system reduces errors and allows for tracking the status of official assignment requests. Security is also good with two-factor authentication and routine monitoring.

Conclusion. The evaluation results show efficiency and transparency, although there are shortcomings in automatic notifications and the need for additional, constantly updated summary data on the amount of the official travel budget for each Regional Apparatus Organisation. Users are satisfied, but older employees may need assistance and adjustments. Obstacles include technological adaptation and concerns about data security. The local government is trying to provide training and protect data to support the system.

Keywords: Evaluation, information quality, system quality, service quality, user satisfaction, net benefits.

DOI: https://doi.org/10.52188/jendelaaswaja.v6i3.1599 ©2025 Authors by Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon



Pendahuluan

Pemerintah perlu mempermudah pengelolaan data seiring dengan perkembangan teknologi. Teknologi informasi penting untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan demi menciptakan pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah, seperti Kota Payakumbuh, akan mendapatkan manfaat dari teknologi yang lebih efektif dan efisien. Pemerintah Kota Payakumbuh telah melaksanakan banyak perjalanan dinas dalam menjalankan tugasnya.

Sebelumnya, administrasi perjalanan dinas dilakukan secara manual. Namun, Pemerintah Kota Payakumbuh mengalami masalah penyelewengan anggaran perjalanan dinas. Oleh sebab itu, pada Agustus 2018, mereka mulai menggunakan Aplikasi e-SPPD untuk mempermudah pengajuan izin dan evaluasi perjalanan dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan aplikasi ini, pengajuan bisa dilakukan secara online, kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu ke kantor. Pemanfaatan teknologi informasi dalam lingkungan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Oleh sebab itu untuk mencapai efektivitasnya, maka perlu adanya uji empiris yang berguna untuk mengukur kesuksesan suatu sistem mengingat masih adanya kendala-kendala yang terjadi pada praktiknya.

Aplikasi e-SPPD juga mempercepat proses persetujuan karena atasan bisa memberikan persetujuan dari mana saja, bahkan ketika di luar kota. Selain itu, sistem ini menjaga pengarsipan dokumen perjalanan dinas dengan menyimpan data secara digital, sehingga lebih aman daripada penyimpanan manual yang rentan kehilangan. Data dapat dengan mudah diakses melalui internet, membantu ASN dalam mencari informasi ketika diperlukan. Aplikasi ini juga memudahkan pegawai dan atasan dalam memantau kegiatan perjalanan dinas, karena laporan harus diinput ke dalam aplikasi untuk disampaikan kepada atasan. Berdasarkan wawancara dengan ASN, setelah penggunaan e-SPPD, beberapa masalah sebelumnya teratasi, seperti pengajuan yang rumit, keterlambatan persetujuan, dan kemungkinan penyalahgunaan izin perjalanan. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mengukur efektivitas aplikasi ini. Penelitian akan mengikuti model efektivitas sistem informasi dari DeLone dan McLean yang mencakup enam dimensi: kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, maksud penggunaan, kepuasan pengguna, dan dampak bersih. Masing-masing dimensi ini akan membantu menilai seberapa baik sistem informasi ini berfungsi dan apakah memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan di Pemerintah Kota Payakumbuh.

Beberapa penelitian terkait dengan penelitian saat ini tentang efektivitas sistem yang digunakan dalam administrasi pemerintah daerah. Sigit Kurnianto dkk. (2019) mempelajari keberhasilan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan menemukan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi mempengaruhi kepuasan pengguna. Namun, fokus mereka adalah pada SISKEUDES, sedangkan penelitian ini berfokus pada e-SPPD untuk administrasi perjalanan dinas. Alfi Sauqi Juhriati (2021) meneliti efektivitas aplikasi SI_MARLIN, berkonsentrasi pada efektivitasnya, berbeda dengan penelitian saat ini pada e-SPPD. Ivan Hari Putra dan rekannya (2022) menilai efektivitas SIMDA BMD di Kota Bandung, menyimpulkan bahwa SIMDA BMD tidak efektif karena kualitas informasi yang buruk, juga berfokus pada sistem yang berbeda dengan e-SPPD. Citta Nadya Celine Wurara (2024) mengevaluasi efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan menemukan adanya masalah dalam pelaksanaannya, meskipun sistem ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode manual. Yuanita Utami (2024) mempelajari efektivitas sistem informasi kearsipan dinamis di Kendal dan mengidentifikasi beberapa elemen positif. Semua penelitian tersebut, meskipun memiliki fokus yang berbeda, menggunakan model DeLone dan McLean (2003).

Identifikasi masalah dalam penerapan e-SPPD di Kota Payakumbuh menunjukkan beberapa isu Pertama, ada gangguan jaringan dan aplikasi yang membuat sering terjadi crash. Kedua, kurangnya sumber daya manusia untuk membuat Surat Tugas menghambat proses persetujuan. Ketiga, laporan perjalanan dinas tidak terkirim otomatis ke pemimpin, mengurangi efektivitas tindak lanjut. Keempat, pengajuan Surat Tugas masih manual dan tidak fleksibel. Terakhir, perlu dilakukan pengukuran efektivitas sistem untuk meningkatkan kinerja e-SPPD

dalam administrasi perjalanan dinas. Untuk mengatasi ini, mereka menerapkan sistem informasi elektronik e-SPPD untuk memperbaiki administrasi. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas e-SPPD menggunakan Model DeLone dan McLean, yang mencakup kualitas informasi, sistem, layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat. Tujuannya adalah untuk menganalisis efektivitas, hambatan, dukungan, dan upaya Pemda dalam sistem e-SPPD Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut e-SPPD di Payakumbuh untuk mengidentifikasi hambatan dan meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Tantangan implementasi, seperti gangguan jaringan dan proses manual, menyoroti perlunya evaluasi ini.

Bahan dan Metode Sampel

Informan dari penelitian ini terdiri dari Pj Wali Kota Payakumbuh, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Inspektur Kota Payakumbuh, Sekretaris Dinas Kominfo, Sub Koordinator Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan.

Organisasi penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang berarti bahwa subjek digambarkan atau dijelaskan sesuai dengan keadaan lapangan (Yunus, M., Zohriah, A., & Fauzi, 2022). Penelitian ini mendeskripsikan hasil penilaian efektivitas impementasi aplikasi e-SPPD pemerintah daerah di Kota Payakumbuh.

Studi ini menggunakan teknik deskriptif atau lebih spesifik menggunakan model interaktif. Model interaktif menurut (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, 2014) dalam pandangan model interaktif, ada tiga jenis kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) dan pengumpulan data sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Data yang banyak perlu dicatat dengan teliti. Sehingga dilakukan reduksi data yang berarti merangkum dan fokus pada hal penting. Setelah itu, data disajikan agar mudah dipahami, sering dalam bentuk teks naratif. Kemudian, dilakukan penarikan kesimpulan dan uji keabsahan data. Ini meliputi empat prinsip: kredibilitas, transferability, confirmability, dan dependability untuk memastikan keandalan penelitian.

Teknik analisis data

Analisis data penelitian ini analisis efektivitas DeLone dan McLean (2016) dengan komponen Kualitas Sistem (*System Quality*), Kualitas Informasi (*Information Quality*), Kualitas Layanan (*Service Quality*), Niat Penggunaan (*Intention to Use*), dan Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*), Dampak Bersih (*Net Impacts*).

Selain itu, untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Jadi, penulis memastikan keabsahan data dengan memeriksa tanggapan informan. Pada akhirnya, untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data yang dihasilkan dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan sangat penting.

Hasil Dan Pembahasan

Kota Payakumbuh, di Sumatera Barat, dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda dan berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Sejak keterlibatan Belanda dalam Perang Padri, kota ini menjadi daerah penting untuk penyimpanan hasil pertanian, terutama kopi.

Salah satu kawasan tua di kota ini adalah nagari Aie Tabik, yang terhubung dengan pusat kota melalui Jembatan Ratapan Ibu. Pada masa penjajahan, Payakumbuh adalah tempat kedudukan pemerintahan.

Kota ini resmi dibentuk pada tahun 1970 dan diatur dalam undang-undang sebagai daerah otonom. Nama Payakumbuh berasal dari istilah lokal yang berarti rawa-rawa. Sebelum tahun 1970, Payakumbuh bagian dari Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tahun 2008, kota ini mengembangkan wilayah kecamatan menjadi lima kecamatan dengan 76 kelurahan.

Visi kota adalah "Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat," dan misi termasuk membangun sumber daya manusia yang kompetitif, perekonomian yang kuat, dan infrastruktur yang baik. Misi lainnya adalah menghadirkan tata kelola pemerintah yang bersih dan menciptakan masyarakat yang berbudaya.

Berikut adalah Struktur Pemerintah Kota Payakumbuh yang dimuali dari Walikota, Sekretaris Daerah, DPRD, Sekretaris DPRD, Staf Ahli, Dinas-Dinas Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Pemerintah Kota Payakumbuh

Penelitian ini menggunakan data wawancara dari enam informan: penjabat walikota Payakumbuh (I1), kepala bagian administrasi pimpinan (I2), sekretaris dinas kominfo (I3), subkoordinator keuangan (I4), sekretaris daerah Payakumbuh (I5), dan inspektur kota (I6). Peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengevaluasi implementasi e-SPPD di pemerintah daerah, dengan menggunakan model efektivitas DeLone dan McLean (2013) dengan enam dimensi: kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, niat penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Sistem e-SPPD di Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh dievaluasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sistem ini memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, tetapi masih mengalami kendala, seperti tidak mendukung iOS. Kecepatan akses dianggap cukup baik, meskipun terkadang ada masalah jaringan. Sistem ini juga terbukti andal dengan sedikit masalah teknis yang cepat teratasi. Sistem e-SPPD efektif dalam mengurangi kesalahan dalam pengelolaan perjalanan dinas. Fitur-fitur yang ada membantu otomatisasi proses dokumentasi, meningkatkan akurasi dan transparansi. Pengguna dapat melacak status permintaan dan persetujuan perjalanan tanpa bertanya ke pejabat. Pada 2024, tidak ada masalah yang ditemukan dalam perjalanan dinas. Dari segi keamanan, sistem ini menerapkan otentikasi dua faktor, kontrol akses berbasis peran, dan enkripsi data, serta pemantauan rutin untuk deteksi pelanggaran.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem e-SPPD memiliki keunggulan dalam aksesibilitas, kecepatan, keandalan, dan keamanan, tetapi ada batasan seperti dukungan untuk pengguna iOS. Sistem ini telah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam manajemen perjalanan dinas. Peneliti juga mengevaluasi kualitas informasi yang diberikan oleh sistem, yang ditemukan sangat akurat dan lengkap, dengan sistem validasi data yang baik dan penyajian informasi yang terstruktur. Namun, ada masalah ketepatan waktu informasi karena kurangnya notifikasi otomatis. Format informasi dianggap baik, tetapi ada saran untuk menambah informasi soal anggaran. Kepuasan pengguna terhadap sistem dinilai tinggi, dengan respons cepat dari teknisi dan tampilan sistem yang mudah dipahami, meskipun pegawai usia lebih tua kadang kesulitan menggunakannya. Pemerintah Kota telah sepenuhnya beralih dari sistem manual ke e-SPPD, sesuai dengan peraturan yang mewajibkan pengajuan izin secara elektronik. User experience menunjukkan sistem ini meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan mempercepat proses. Walikota mencatat pentingnya transparansi dan akses, meski ada lagi pengembangan yang dibutuhkan untuk laporan perjalanan dinas. Secara keseluruhan, e-SPPD berdampak positif pada ASN, meningkatkan produktivitas dan transparansi, serta membantu Pemerintah Kota Payakumbuh meraih penghargaan anti korupsi.

Melalui evaluasi ini, terlihat bahwa sistem e-SPPD membawa banyak manfaat bagi Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh, meningkatkan efisiensi, kepuasan pengguna, dan memberikan transparansi. Selain itu juga terdaoat dampak negatif dari sistem e-SPPD terhadap pegawai pemerintah di Payakumbuh. Kepala divisi administrasi mencatat bahwa meskipun e-SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas Elektronik) merupakan langkah menuju modernisasi dan peningkatan efisiensi, sistem ini juga menghadirkan tantangan. Beberapa pegawai masih kesulitan beradaptasi dengan teknologi ini, yang dapat menyebabkan keterlambatan pengajuan surat perintah perjalanan dinas dan mengganggu administrasi pemerintahan. Keamanan data dan serangan siber juga menjadi perhatian. Penggunaan sistem elektronik meningkatkan risiko penyalahgunaan atau kebocoran data; sebuah serangan sistem dapat menghentikan proses. Meskipun belum ada kejadian, hal ini masih merupakan masalah yang signifikan. Penjabat walikota menyarankan agar setiap OPD pemerintah menunjuk seorang perwakilan untuk mengikuti pelatihan khusus untuk mengurangi efek negatif ini. Orang-orang yang terlatih ini

dapat membantu rekan kerja beradaptasi dengan sistem e-SPPD. Perlindungan terhadap ancaman siber dan risiko keamanan data juga sangat penting. Pemerintah berencana untuk menerapkan enkripsi yang kuat dan evaluasi keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi ancaman sistem yang mungkin.

Kessimpulan

Efektivitas sistem informasi e-SPPD dalam administrasi perjalanan dinas ASN di Kota Payakumbuh dinilai melalui enam dimensi: kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, tujuan penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat. Akses ke sistem e-SPPD dianggap mudah, tetapi tidak mendukung perangkat iOS. Meskipun ada masalah jaringan sesekali, sistem ini efektif dalam mengurangi kesalahan dan kecurangan. Fitur otomatis mengurangi risiko kesalahan manual dan memungkinkan pengguna melacak status permintaan perjalanan. Keamanan sistem baik dengan otentikasi dua faktor dan enkripsi data.

Hasil evaluasi menunjukkan e-SPPD memiliki kelebihan dalam aksesibilitas dan kecepatan, tetapi menggunakan iOS masih menjadi masalah. Sistem ini meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam manajemen perjalanan dinas. Informasi yang dihasilkan sangat akurat berkat mekanisme validasi yang baik. Kualitas layanan dinilai dari kepuasan pengguna, dan meskipun tampilan sistem mudah dipahami, pegawai berusia lebih tua mungkin membutuhkan bantuan. Walikota menyatakan bahwa sistem ini efektif untuk transparansi, tetapi pembuatan laporan perjalanan perlu ditingkatkan.

Meski e-SPPD menunjukkan banyak manfaat, ada tantangan, seperti pegawai yang kesulitan beradaptasi dengan teknologi dan risiko keamanan data. Manual verifikasi untuk bukti pembayaran masih menjadi celah dalam potensi penyimpangan. Pemda berupaya melakukan pelatihan untuk perwakilan OPD dan meningkatkan perlindungan data. Efisiensi perjalanan dinas telah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Walau ada pengurangan perjalanan, e-SPPD membantu mengontrol anggaran dan mengurangi ketimpangan bagi pegawai yang berangkat.

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang diajukan. Untuk Pemerintah Kota Payakumbuh, disarankan untuk menambah tampilan data rekapitulasi anggaran perjalanan dinas, memasukkan perjalanan dinas dalam provinsi ke dalam e-SPPD, serta menambahkan fitur notifikasi agar SPPD tidak terlewat. Selain itu, perlu adanya integrasi dengan aplikasi resmi untuk pemesanan tiket dan akomodasi. Juga, pelatihan untuk pengguna e-SPPD sangat penting untuk mengatasi hambatan. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menilai efektivitas sistem informasi elektronik lainnya di pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi Sauqi Juhriati. (2021). Efektivitas penerapan program aplikasi sistem manajemen administrasi berbasis online (SI_MARLIN) dalam pelaksanaan administrasi perkantoran di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Citta Nadya Celine Wurara, Stefanus Sampe, Donald K. Monintja, Michael Mamentu, Fanley N. Pangemanan, & Steeva G. Rondonuwu. (2024). Efektivitas penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan di Kota Tomohon.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. Journal of Management Information Systems, 19(4), 9–30. https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748

- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2016). Information systems success measurement. Foundations and Trends® in Information Systems, 2(1), 1–116. https://doi.org/10.1561/2900000005
- Ivan Hari Putra, Slamet Ismanto, & Nunung Runiawati. (2022). Efektivitas sistem informasi manajemen daerah barang milik daerah (Simda BMD) pada pemerintahan daerah Kota Bandung.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muhammad Yunus, Anis Zohriah, & Anis Fauzi. (2022). Implementasi supervisi akademik kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMP Negeri 1 Mancak, SMP Negeri 2 Anyar, dan SMP Negeri 1 Gunungsari Kabupaten Seran.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Yuanita Utami, Halilul Khairi, & Ika Sartika. (2024). Efektivitas penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.

Information about the authors:

Muhammad Febria Azmi,: muhammadfebriaazmi@gmail.com, Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta

Prof. Dr. Ir. Triyuni Soemartono, M.M.: triyuni.soemartono@lecture.moestopo.ac.id. https://orcid.org/0009-0005-9263-3626, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Indonesia

Dr. Harry Nenobais, M.Si: harryneno@lecture.moestopo.ac.id, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Indonesia

Cite this asticle as: Febria Azmi, Muhammad. (2025). Efektivitas Sistem Informasi Elektronik Surat Perintah Perjalanan Dinas (E-Sppd) Dalam Meningkatkan Administrasi Perjalanan Dinas Pegawai Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh. *Jurnal Jembatan Efektivitas Ilmu Dan Akhlak Ahlussunah Wal Jama'ah*, 6(3). 536-543. https://doi.org/10.52188/jendelaaswaja.v6i3.1599